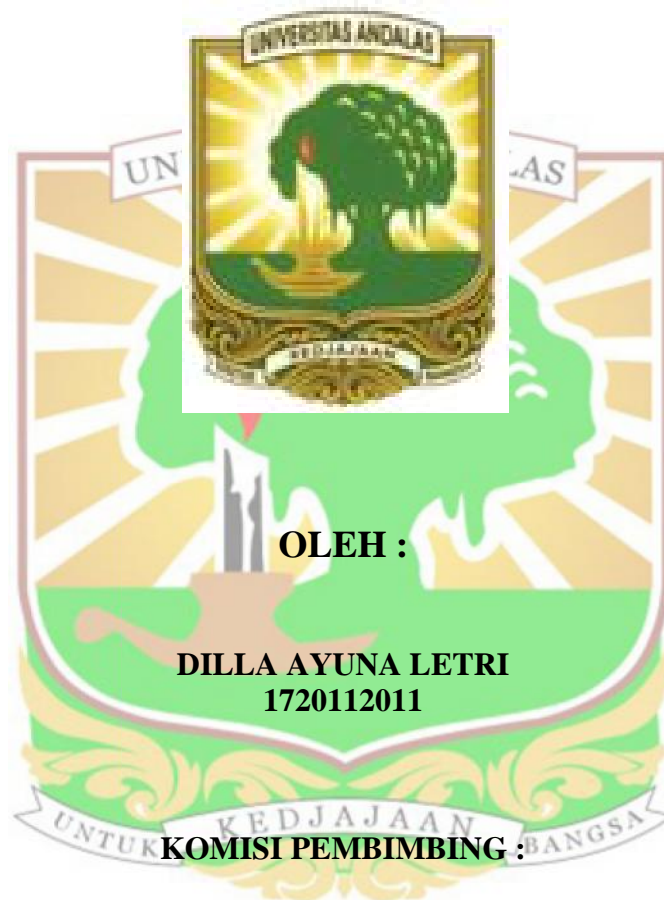


## **DRAFT TESIS**

**KERJASAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI  
PADANG DENGAN LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN  
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) PROVINSI  
SUMATERA BARAT TERHADAP PENGAWASAN KEHALALAN PRODUK  
PANGAN KEMASAN**



- 1. PROF. DR. H. YASWIRMAN, MA**
- 2. DR. ZEFRIZAL NURDIN, S.H.,M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

**KERJASAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPPOM) DI  
PADANG DAN LEMBAGA PENKKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN  
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) PROVINSI  
SUMATERA BARAT TERHADAP PENGAWASAN KEHALALAN PRODUK  
PANGAN KEMASAN”**

(DILLA AYUNA LETRI, NIM : 1720112011, Program Studi Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 139 hlm, 2019)

**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam, oleh karena itu negara harus melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan halal sesuai akidah setiap muslim. Realitanya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Di Indonesia dengan banyaknya beredar produk pangan kemasan yang belum jelas kehalalannya maka diperlukan pengawasan terhadap produk tersebut agar aman dikonsumsi oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengkaji tentang : 1) Bagaimanakah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan. 2) Bagaimanakah kewenangan Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan. 3) Bagaimanakah bentuk kerjasama antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Bara terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan penelitian *yuridis empiris*. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari pihak terkait dalam pengawasan produk pangan kemasan, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kewenangan Badan POM dalam melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk pangan kemasan terdapat dalam 2 (dua) hal, yaitu : pengawasan pre-market dan post market. Kewenangan LPPOM MUI dalam melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk pangan berkemasan dilakukan oleh Auditor Halal dan Auditor Halal Internal di suatu perusahaan. Sampai saat ini kerjasama yang dilakukan LPPOM MUI dengan BBPOM hanya terkait pada pencantuman label pada pangan olahan serta LPPOM MUI juga bekerjasama dengan Disperindag dengan memberikan anggaran khusus dalam memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal.

**Kata Kunci : Kerjasama, Kehalalan, Pangan Kemasan**